

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandria, Virginia. 2009. "Internal Auditing in the Public Sector." *International Journal of Management* IX, no. 1. United States of America. Diakses pada 1 April 2019. www.icgfm.org.
- Anonim. 2018. Pemantauan Laporan Keuangan serta Penyelesaian Tindaklanjut LHP pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PUPR. Diakses pada 20 Juli 2019. <https://www.pu.go.id/>
- Anonim. 2019. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Diakses pada 15 April. <https://dpu.kulonprogokab.go.id/>
- Arens, Elder, dan Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Jilid 1, Edisi Kedua Belas. Erlangga. Jakarta.
- Bradley, Leah, Paula. 2017. "A survey on firms" implementation of COSO's 2013 Internal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013. *Internal Control—Integrated Framework*. Diakses pada 28 Februari 2019. <http://www.coso.org/>.
- Control—Integrated Framework." *Research in Accounting Regulation*. Diakses pada 1 April 2019. www.elsevier.com/locate/racreg.
- Cresswell, J. 1998. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dean, J, Champion. 1990. *Basic Statistik for social research*. New York: mac Media
- Devega, Lidya. 2017. *Evaluasi Struktur Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengadaan Barang atau Jasa Organisasi Publik: Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Tesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Febriana, Ayu. J.W. 2016. *Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau*. Yogyakarta: Tesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Gratiano, Matheus. 2015. *Analisis Penerapan Kebijakan SPIP Sesuai COSO Internal Control Framework terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao*. Yogyakarta: Tesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Halim, A. 2016, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.

- Halim, Devina. 2018. ICW: Kasus Korupsi Massal DPRD Malang Bukti Budaya Korupsi Permisif. Diakses pada 20 Juli 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/21224141/icw-kasus-korupsi-massal-dprd-malang-bukti-budaya-korupsi-permisif>.
- Hery. 2013. Auditing. CPAS. Jakarta.
- Institute of Internal Auditors (2006), *The Role of Auditing in Public Sector Governance*, Altamonte Springs, FL, Institute of Internal Auditors.
- Kirk, J. & Miller, M, L. 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills, CA, Sage Publications.
- Komite SPAP Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart. 2014. Sistem Informasi Akuntansi: Accounting.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
- Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Pekerjaan Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Sekaran, U, dan Bougie, R. 2009. *Research Methods for Business*. Edisi Kelima: A Skill Building Approach. West Sussex, UK: WILEY.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Wibisono, T, 2010. *Mencapai Tujuan Nasional bersama SPIP dan Integritas, dan Etika sebagai pilihan*, *Warta Pengawasan Volume XVII, Nomor 2 Juni 2010*. Jakarta: BPKP.